

## **PENDAHULUAN**

---

Lebih dari 30.000,- anak-anak di Jepang saat ini berada dalam perlindungan negara. Roger Goodman menggambarkan salah satu institusi untuk anak-anak di Jepang, yang masih mengadopsi tradisi dalam membina anak-anak yang membutuhkan perawatan serta menjelaskan pentingnya peran pekerja sosial profesional dalam sebuah negara.

Sejak pergolakan sosial-ekonomi, keluarga-keluarga di Jepang mengalami periode yang luar biasa mereka kehilangan sebagian status sebagai benteng stabilitas sosial, masalah yang terjadi dalam keluarga meningkat, seperti tingkat perceraian masal, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan terhadap anak-anak, dan penurunan tingkat pendapatan keluarga yang berdampak pada perubahan konsep hubungan keluarga secara fundamental. Hal ini menjadi latar belakang terjadinya perubahan sosial yang dinamis tentang perubahan perlindungan anak oleh lembaga perlindungan anak yang ditulis oleh Roger Goodman dalam bukunya "*Children of the Japanese state the changing role of child protection institutions in contemporary Japan.*"

Berdasarkan perspektif Eropa Barat, beberapa aspek perlindungan anak di Jepang sangat kurang dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat, terutama dalam pelibatan pekerja sosial profesional dalam membantu anak-anak yang membutuhkan perawatan. Model institusi perlindungan anak di Jepang sangat berbeda dengan model perlindungan di Inggris atau skandinavia, karena Jepang memiliki sistem tradisional yang kuat dan sulit untuk di ketahui. Hal ini menjadi tantangan bagi para peneliti seperti Profesor Roger Goodman yang sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang system tradisional masyarakat Jepang dengan menggunakan dua konsep penelitian yaitu penelitian kondisi tradisional masyarakat Jepang dengan pendekatan etno-sentris dan penelitian substatif . Goodman melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi masyarakat Jepang dan gambaran lembaga yang mengurus anak-anak di Jepang dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah anak di Tokyo dan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang bekerja di bidang kesejahteraan anak yang dilakukan selama hampir dua dekade (1998-1999) yang bertempat di Osaka.

Setelah adanya pergeseran yang terjadi pada masyarakat Jepang, Lembaga perlindungan anak Jepang cepat tanggap untuk melakukan perubahan. Fenomena sosial yang terjadi di Jepang pada tahun sembilan puluhan adalah peningkatan perceraian, penganiayaan anak dan tingkat bunuh diri orang tua yang terus meningkat yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk, serta pengaruh eksternal seperti abad Globalisasi telah mendorong langkah perubahan dalam sistem perlindungan anak di Jepang. Perubahan ini merupakan keinginan sendiri dari masyarakat Jepang dengan melakukan penyempurnaan kebijakan kesejahteraan sosial dan penandatanganan Konvensi PBB tentang Hak-hak anak, perlindungan anak dan perawatan anak.

Buku ini mengajak para pembaca untuk mengetahui lebih banyak setiap aspek dari sistem perlindungan anak Jepang serta isu-isu yang terkait. Bab pertama menceritakan tentang pengucilan sosial di Jepang dan menempatkan perlindungan anak dalam konteks Internasional. Sebanyak 31.000 anak-anak di Jepang berada dalam perawatan negara, Jumlah ini relatif sedikit dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya, namun jumlah tersebut cukup konsisten selama puluhan tahun, sedangkan di negara-negara industri maju lainnya angka itu telah menurun drastis karena penurunan tingkat kelahiran dan perubahan kebijakan kesejahteraan anak. Bab Dua membahas tentang pengembangan kesejahteraan sosial Jepang pada tahun sembilan puluhan, Goodman melakukan penelitian tentang konsep-konsep yang mendasari kesejahteraan Jepang, meliputi periode pasca perang yang diperoleh dari seorang sukarelawan penasehat unik Jepang (*Minsei Jidouin*).

Pada Bab tiga fokus menceritakan tentang analisis situasi pengembangan perlindungan anak di Jepang. Goodman berhasil mencakup seluruh spektrum Institusi perawatan pasca perang tidak hanya pada lembaga-lembaga perlindungan anak (*yougoshisetsu*) yaitu Institusi untuk menampung anak (tidak termasuk bayi) yang tidak memiliki wali atau anak yang mengalami penganiayaan atau sebaliknya dan mereka membutuhkan perlindungan, tetapi juga pusat-pusat bimbingan anak (*Jidousoudanjo*) institusi anak-anak yang orangtuanya tidak dapat/tidak mengharapkan/tidak ingin mengurus dan menjaga mereka, Penampungan ibu-anak (*Boshiryou*) yaitu fasilitas untuk membantu ibu yang sebagai orang tua tunggal

Bab Delapan berisi tentang perkembangan perubahan peran lembaga perlindungan anak di Jepang yang keberadaannya mengalami dua ancaman besar yaitu angka kelahiran yang menurun dan konvensi PBB tentang Hak Anak yang tidak mendukung perawatan anak dalam Institusional. Terdapat perbedaan antara Isi dari Konvensi PBB tentang Hak-hak anak dengan budaya Jepang sehingga hal ini menjadi tren yang mengarah pada perbedaan peran perlindungan anak di abad ke- 21.

## **Bab I**

### ***Studi tentang Golongan Sosial di Jepang***

---

Pasca Perang dunia ke 2, Jepang telah meminimalkan perbedaan kelas sosial, karena sebagian besar masyarakat Jepang yang bekerja pada eklsusi sosial telah terkonsentrasi pada Japan & minoritas kelompok Ainu, Okinawa, Zirkhi-Kankokujin (Jepang-Korea), korban bom atom, burakunii (petani yang tidak tersentuh) yang telah menghadapi banyak masalah pada masa pasca perang, telah mampu memobilisasi politik sehingga status mereka telah berangsur-angsur membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pekerjaan yang lebih mutakhir telah di fokuskan pada buruh harian Jepang yang tinggal di Tokyo, Osaka dan Yokohama. Sementara individu yang tinggal di pinggiran kota Jepang merupakan masyarakat yang melarikan diri, pelepasan mereka dari masyarakat, serta pengucilan.

Pada pertengahan tahun 1980-an Goodman memutuskan untuk belajar eklsusi sosial dalam masyarakat Jepang melalui studi anak-anak. Mereka di dorong kepinggiran masyarakat bukan karena kesalahan mereka, tetapi untuk menghapus dari ruas kekuatan ekonomi dan politik Jepang. Hal ini menarik perhatian Goodman dengan mengetahui bagaimana anak-anak diperlakukan akan menjelaskan nilai-nilai lapisan sosial dan terbukti sangat bermasalah.

Langkah pertama Goodman melakukan studi terhadap anak-anak Jepang yang tinggal di Luar Negeri dan kemudian kembali ke Jepang (*kikokushijo*). Pada awal tahun 1980-an anak-anak di gambarkan sebagai kelompok minoritas baru Jepang yang ternoda untuk kembali ke Jepang sebagai akibat dari kontaminasi mereka

dengan dunia luar dan mereka dijadikan contoh kelompok sosial yang di kecualikan, sekalipun orang tua mereka berasal dari kelas menengah keatas seperti dokter gigi, akademisi, wartawan, pengusaha dan diplomat seolah tidak peduli. Untuk mengatasi masalah anak-anak tersebut, pemerintah melakukan pelayanan pendidikan khusus, sistem masuk universitas khusus dan kuota kerja perusahaan secara khusus dan keterampilan yang mereka miliki melalui media massa dengan kata kunci *kikokushijo International* sehingga anak-anak mereka terlihat satu-satunya pemilik keterampilan yang diperlukan untuk mengambil alih kekuasaan Jepang pada abad ke-21. Hal ini menjadikan para *kikokushijo* menjadi kelompok minoritas yang bukan hanya karena jumlahnya yang sedikit tetapi bukan lagi dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam hal kekuasaan ekonomi dan politik Jepang.

Pada awal tahun 1990-an, Goodman melakukan studi tentang sekolah untuk anak-anak (*yougogakko*) yang merupakan sarana untuk anak-anak cacat di Jepang. Hasil studi menunjukkan bahwa anak-anak cacat di Jepang diperlakukan dengan sangat diskriminatif, sebagian dari keluarga mereka menolak keberadaan anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat dan sebagian dari keluarga mereka ingin mereka terus terlihat normal untuk menghindari agar kemungkinan tidak mengganggu tetapi hal ini tidak bisa dibiarkan sehingga orangtua dari anak-anak cacat yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi akan menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka.

Selanjutnya fokus penelitian Goodman pada lembaga-lembaga lembaga perlindungan anak yang dikenal yang sejak tahun 1998 dikenal sebagai *Jido Yougoshisetsu*, istilah *Yougoshisetsu* merujuk pada istilah Jepang sebagai rumah anak atau hanya homes yang mencerminkan lembaga-lembaga memberikan tindakan/layanan. Istilah *Yougoshisetsu* memiliki arti yang jauh lebih besar dibandingkan dengan panti asuhan dalam bahasa Inggris.

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa panti asuhan di Jepang diantaranya *Kodomo Gakuen* (rumah anak-anak) di daerah Barat Tokyo dan mengunjungi beberapa rumah lainnya di Tokyo, menghadiri konferensi kesejahteraan anak serta berhasil mewawancarai para pembuat kebijakan dan para akademisi di Jepang, diketahui bahwa anak-anak *Yougoshisetsu* tidak hanya menjadi kelompok minoritas

~~Itapi~~ juga merupakan kelompok marjinal dalam hal akses terhadap kekuatan ekonomi dan politik Jepang. Orang tua dari mereka lenyap dan memilih untuk ~~meninggalkan~~ mereka.

Karena adanya kecurigaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak *Yougoshisetsu*, setelah melakukan penyelidikan pejabat setempat yang memiliki kekuasaan yang lebih besar pada bulan Mei tahun 2000 mengeluarkan Undang-undang yang mengharuskan pelaporan wajib penyalahgunaan wewenang yang dilakukan orang tua, dengan memperketat definisi tentang pelecehan dan penggunaan kekuatan yang lebih besar untuk menghapus penyalahgunaan kewenangan orang tua.

Secara umum tidak ada literatur dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang istilah Layanan kesejahteraan anak dan sistem layanan sosial pribadi di Jepang.

Jepang merupakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia yang memiliki angka harapan hidup tertinggi, angka kematian bayi dan angka perceraian terendah, tingkat kelahiran tidak sah terendah, penduduk dunia yang memiliki pendidikan dan melek huruf tertinggi serta memiliki tingkat kejahatan terendah dari seluruh seluruh negara OECD, bahkan sejak tahun 1985-1995 tingkat kejahatan remaja menurun secara signifikan. Setelah Periode Pasca perang dunia ke dua, Jepang memiliki proporsi yang lebih rendah dari pengeluaran pemerintah langsung pada kesejahteraan sosial dari sebagian besar persaingan OECD. Mengingat fakta diatas, tidak mengherankan selama dua puluh lima tahun terakhir (sejak awal keajaiban ekonomi Jepang) hal ini telah menjadi panggilan periodik di negara-negara OECD lainnya dalam menghadapi tagihan peningkatan kesejahteraan dan melihat penyelesaian masalah sosial di negara-negara OECD dengan melihat sistem kesejahteraan Jepang sebagai model untuk reformasi kesejahteraan.

### **Perlindungan Anak dalam Perspektif Komparatif**

Studi tentang perlindungan anak juga merupakan studi tentang sikap sosial terhadap anak-anak dan keluarga. Lorraine Fox Harding (1991 :3-4) telah menulis tentang anak-anak di Inggris : meskipun perlindungan anak secara formal dari

negaranya hanya melibatkan sebagian kecil anak-anak, tetapi Peran negara dalam memberikan perawatan bagi anak-anak sebagai alternatif untuk perawatan orang tua dalam kasus Jepang. masalah penyediaan kesejahteraan bagi anak-anak memiliki ketepatan khusus karena negara ini memiliki sumberdaya yang sangat sedikit dari anak-anaknya. Anak-anak sering digambarkan sebagai kuni takara (permata negara) investasi dan dipandang sebagai potensi daerah yang paling penting dari kebijakan sosial.

Perubahan dan perkembangan sistem perlindungan anak yang terjadi di negara yang berbeda, mencerminkan keyakinan, ideologi dan tradisi yang berbeda pula.

## **Bab II**

### ***Pembangunan Kesejahteraan serta asal-usul kesejahteraan di Jepang***

---

Pengembangan kesejahteraan sosial di Jepang dimulai pada abad ke-6 Shotoku Taishi (574-622) yang membuat kebijakan budi. Shotoku adalah orang yang secara luar membawa agaman Buddha ke Jepang, dan Buddhisme merupakan kekuatan pendorong sebagian besar kegiatan kesejahteraan di Jepang. Pembentukan Lembaga kesejahteraan pertama terletak di kompleks candi *shitennoji* di Naniwa (sekarang Osaka). Dalam Shikano mencakup empat jenis kesejahteraan dan lembaga kesehatan, termasuk rumah (*Hidenin*) yang melayani orang miskin, anak-anak (dibawah 16) tahun dan lansia (diatas 60 th) terlantar hal ini menjadi Program pertama kesejahteraan Jepang yang diberinama "Program bantuan publik" yang menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara.

Selain itu buddisme juga telah menjadi pendorong tokoh lainnya seperti Hironomushi (730-99) dan Imam Gyoki Buddha (668-749) pada periode Nara yang menjadi tokoh lahirnya Kegiatan Kesejahteraan Wake khusus melayani anak-anak yatim yang disimbolkan dengan wanita yang merawat banyak anak yatim, dan menjadi pondasi bagi panti asuhan Jepang. pada periode ini kesejahteraan orang miskin menjadi tanggung jawab tuan-tuan feodal lokal yang sudah memberikan dukungan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Pada abad pertengahan, kesejahteraan masyarakat Jepang masih diwarnai oleh tindakan pendeta Buddha seperti Chogen (1128-1206), Elson (1201-90 dan Ninsho (1217-1330) menjadi seorang relawan sosial Jepang yang dikaitkan dengan fasilitas kesejahteraan masyarakat miskin termasuk anak-anak yatim yang membutuhkan fasilitas tersebut. Selanjutnya sejarah pengembangan fasilitas dan kegiatan kesejahteraan di Jepang semakin terkenal sejak kedatangan Francis Xavier (1506-1552) dan misionaris kristen (1546) yang telah melakukan tindakan amal bersama kegiatan mereka misionaris dan komersial. Xavier berperan aktif dalam mengorganisir kegiatan kesejahteraan untuk orangtua dan anak yatim di Jepang Barat.

Pada tahun 1552 Portugis misionaris Luis d'Almeida (1525-1583) mendirikan panti asuhan terkenal di Oita prefektur di Jepang. Salah satu kegiatan misionaris ini adalah memberantas kegiatan aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang tidak diinginkan di Jepang, hal ini bertentangan dengan pandangan budaya Jepang dengan kesejahteraan dan hak hidup masyarakat. Berdasarkan Data Demografi Jepang, selama periode 250 tahun Jepang telah mengalami kestabilan ledakan jumlah penduduk hal ini mendorong pemerintah Jepang untuk memberlakukan metode keluarga berencana yang mulai tersebar di daerah utara dan barat Jepang, hal ini diperkuat oleh iklim combination dan sistem pajak yang regresif membuat keluarga mengalami kesulitan untuk mempertahankan hidup dengan lebih dari satu atau dua orang anak. Pembunuhan bayi yang umum telah banyak dilakukan oleh masyarakat Jepang di representasikan dengan boneka kayu Kokeshi berbentuk anak-anak banyak di perjual belikan sebagai pelipur lara bagi keluarga atau tanda perdamaian dari anak-anak yang sudah mati.

Pekerja misionaris Kristen drastis dibatasi oleh deklarasi kristen pada tahun 1613 dan terjadi pengusiran besar-besaran di Jepang pada tahun 1639 setelah satu abad melakukan aktivitas di Jepang. Namun para misionaris kristen telah memperkenalkan konsep kerja kesejahteraan di Jepang sehingga ketika Jepang membuka diri untuk dunia luar pada akhir abad kesembilan belas para misionaris kristen bisa masuk kembali ke Jepang dan kelompok misionaris ini menjadi salah satu penyedia utama layanan sosial pribadi swasta di Jepang, kegiatan ini

berlangsung dan terkenal sampai sekarang, meskipun jumlah orang kristen di Jepang tidak lebih dari satu persen dari total jumlah penduduk Jepang.

Pada periode Tokugawa, tanggung jawab untuk kesejahteraan sosial di Jepang semakin dirasakan, tanggung jawab ini dilimpahkan kepada keluarga dan masyarakat yang dikenal dengan sistem tingkat Goriin Gutni Seido (lima keluarga unit sistem) yang dibentuk pada tahun 1643. Pada rezim Tokugawa Jepang telah dikenal dan tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu negara bagian paling konservatif *police* dan feodal, larangan mobilitas sosial dan tanggung jawab kesejahteraan bersama yang telah dibangun dalam Goriin Gutni seido masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab untuk kesejahteraan setiap individu, tetapi tindakan individu-individu menjadi tanggung jawab setiap individu, dimana setiap individu harus bertanggung jawab dan siap di hukum untuk mempertanggung jawabkan setiap kesalahannya. Setiap individu menjadi informer otoritas negara untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Jepang. cara seperti ini dianggap paling efektif untuk menghindari kemiskinan dan ideologi ini di dukung oleh penyebaran kode yang menekankan penghormatan terhadap status quo.

Saat ini Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki bentuk asosiasi lingkungan yang biasa di sebut *Chanaiki*. Tokugawa memiliki perang yang sangat besar dalam menggagas pembentukan Neo-Konfusianisme yang memiliki pengaruh pada pengembangan ide-ide kontemporer tentang ketentuan kesejahteraan, dan perlindungan dengan cara membangun jaringan "penciptaan kembali tradisi" yang berkesinambungan berdasarkan sejarah.

Selama periode Tokugawa, secara berkala memperkenalkan legislasi untuk mengendalikan praktek-praktek pembutuhan anak dan memberikan hukuman bagi orang tua yang melakukannya (seperti di *fukuoka*) atau dengan menawarkan uang (*chikuhi*) untuk membatu orang tua membesarkan anak-anaknya, bagi orang tua yang melakukan pelanggaran pembunuhan diadili di Scadai dan Kutu.

Pada periode Tokugawa, belum ada fasilitas kesejahteraan khusus untuk perawatan dan perlindungan anak. Pada periode ini kesejahteraan masyarakat lebih ditekankan pada agronomis. Pada masa Sato Nohuhiro (1769-1850), pertama kali diusulkan pembentukan lembaga yang dikelola oleh negara untuk masyarakat miskin

yang membutuhkan. Singkatnya pada masa Tokugawa sampai periode Meiji (1868-1912) peran negara dalam penyediaan kesejahteraan masyarakat Jepang digambarkan dalam frasa yang digunakan oleh Komatsu (1992) sebagai salah satu negara yang non-responsibel peripheral. Berdasarkan tradisi ajaran-ajaran moral *Konfusianisme*, bahwa keluarga dan masyarakat lokal menjadi organ yang tepat untuk diberikan tanggung jawab kesejahteraan masyarakatnya.

Versi standar dari sejarah pengembangan kesejahteraan di Jepang di reformasi konsep Buddhis yang dibandeng sebagai oposisi untuk pengembangan kesejahteraan. Bagi berdasarkan hak-hak warga negara. Ideologi Neo-Konfusianisme kerja keras, hemat, dan dukungan keluarga bersama serta tanggung jawab kesejahteraan masyarakat jadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat lokal di tekankan pada masa periode Tokugawa. Hal ini mengakibatkan timbulnya problem sosial yang sangat besar, daerah kumuh, pengangguran, kemiskinan dan berbagai konflik sosial bermunculan.

Keadaan seperti ini telah menarik perhatian Ogawa Shigejiro (1912) untuk membuat tulisan apakah mungkin dalam rangka mengatasi kemiskinan pemerintah lokal mampu untuk mengembangkan cara Jepang yang menekankan pentingnya keluarga khususnya istri yang mengelola anggaran keluarga? hal ini berbeda dengan contoh model negara barat yang jauh dari kemiskinan. Pada tahun 1913 Ogawa pindah ke Osaka dan mendirikan kelompok studi pekerjaan sosial dan reformasi sosial. Kelompok ini meneliti sistem-sistem alternatif penyediaan kesejahteraan sosial, termasuk sistem dukungan rumah tangga bersama di china, *Gorin Gumi seido* dan feodal Jepang dan berbagai model kesejahteraan di Jerman dan Amerika.

Pada tahun 1938 sebelum perang dunia kedua Jepang mulai mendirikan kementerian kesejahteraan, dan memperkenalkan asuransi pensiunan, sejak saat itu Jepang sudah mulai meletakkan tanggung jawab negara kesejahteraan. Setelah pasca perang dunia kedua Jepang kesejahteraan masyarakat Jepang menjadi sangat terpuruk sejarawan menyebutnya lembah gelap (*kurai toni*) tetapi peran negara dan masyarakat menjadi saling terkait untuk memastikan kerjasama penuh bangkit dari keterpurukan.

## **Pengembangan dan Penyediaan Kesejahteraan Sosial pada Periode Pasca Perang**

periode pasca perang dunia kedua, Jepang memperkenalkan Undang-undang Mobilisasi Nasional (*Kokka Sodonho*). Setelah pengenalan undang-undang tersebut pada tahun 1939 pemerintah Jepang dipimpin oleh Menteri Kesejahteraan pertama mengeluarkan/ menetapkan peraturan (set regulations) tentang hubungan kerja yang menurut beberapa sarjana/ahli dianggap efektif menciptakan struktur pengelolaan perusahaan modern pria Jepang dan dilembagakan praktek kesejahteraan di banyak perusahaan. Selama perang dunia berlangsung, skema asuransi kesehatan masyarakat pertamakali didirikan pada skala kecil, pada tahun 1920 diperluas untuk menjaga kesehatan warga terutawa usia wajib militer.

Menurut Sejarah sejak tahun 1870 sebelum periode perang telah diciptakan para pekerja sosial yang memberikan pengobatan burakwniri dibawah idelogi bahwa semua warga negara jepang adalah anak-anak (*sekishi*) kaisar. Namun pada tahun 1945 akhirnya Jepang muncul menemukan dirinya (setelah hampir empat belas tahun perang terus menerus) dibawah pasukan Amerika yang dipimpin oleh Jendral MacArthur. Salah satu misi pertama MacArthur pada periode masa perang adalah membasmi rasionalisme Ultra dan menyebarkan konsep demokrasi liberalisme dan kewarganegaraan sekutu. Pasukan penduduk Jepang ingin melihat budaya reformasi kesejahteraan berakar di Jepang, sehingga pada tahun 1946 dibawah bimbingan dari Amerika, Jepang mennyediakan kesejahteraan bagi semua warga negaranya secara adil sama untuk semua lapisan masyarakat.

Bentuk kesejahteraan yang dibangun di Jepang tetap sama, tidak ada pembersihan maupun pelatihan yang berbeda hanya namanya saja, yang semula *Homeniin* menjadi *Minseniin* sehingga tidak ada perbedaan pikiran dari banyak orang, hal ini lebih merupakan lembaga kontrol sosial dalam keadaan ultra-nasionalis dari penyedia kesejahteraan sosial. Para *Minseniin* istilah umum untuk orang-orang yang ditugaskan untuk mempromosikan dan menstabilkan kehidupan *Minseniin*, kebanyakan orang pada saat itu ditunjuk menjadi *Jidoiin* (petugas kesejahteraan anak) yang bertugas khusus menjaga kesejahteraan anak-anak dalam komunitas mereka.